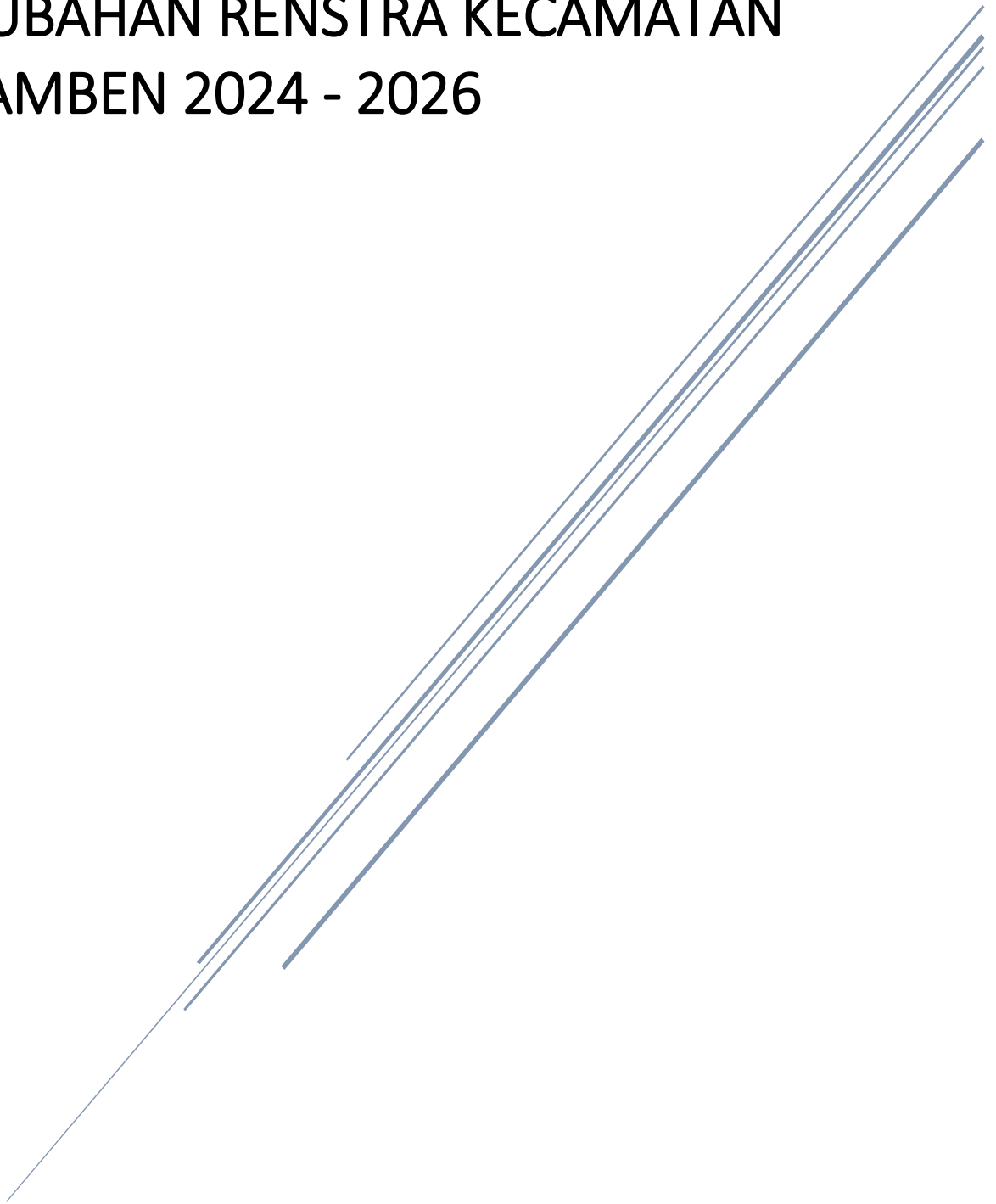




PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN KESAMBEN 2024 - 2026



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan diharapkan menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas masing-masing unit kerja mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan perencanaan dapat memperkirakan proses pencapaian tujuan menjadi lebih terarah. Perencanaan memberi kesempatan pula untuk memilih berbagai alternatif tentang cara terbaik untuk memilih. Perencanaan juga merupakan alat ukur untuk melakukan evaluasi. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, diperlukan perencanaan yang baik agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Tugas Pokok Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang yang tertuang didalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang, Kecamatan adalah mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kesamben Tahun 2024 - 2026 merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, diperlukan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026 yang disusun sebagai dokumen Pengganti RPJMD dan Renstra (2018-2023) yang telah berakhir sekaligus sebagai landasan pelaksanaan penyusunan RKPD dan Renja PD untuk tahun 2024-2026. Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah harus memperhatikan sinkronisasi dan keselarasan Tujuan, Sasaran dan Program Perangkat Daerah, dengan Tujuan dan Sasaran

Pembangunan Daerah dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

Program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Renstra 2024-2026 berpedoman Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyusunan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah yang terintergrasi melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang tahun 2024-2026 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja Kecamatan Kesamben setiap tahun mulai Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.

Guna mencapai kondisi di atas, tentunya dibutuhkan kebijakan strategis dan konsisten serta berorientasi jauh ke depan. Sehingga peran sumber daya aparatur menjadi sangat dominan dalam hal memberikan mediasi, motivasi dan berbagai bentuk fasilitasi kepada masyarakat.

Untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka disusun Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kesamben Tahun 2024-2026 yang memuat tujuan, sasaran, dan program yang mengacu pada dokumen RPD Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026.

1.2 Landasan Hukum

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kesamben Tahun 2024 - 2026 disusun dengan memperhatikan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 – 1317 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir tahun 2023;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Timur;
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 10/E);
19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten

- Jombang Nomor 45/D, Tambahan Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 45/D);
20. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang tahun 2024 - 2026
21. Surat Bupati Jombang Nomor 050/8051/415.42/2022 tanggal 12 Oktober 2022 perihal Penyusunan Dokumen Renstra Perangkat Daerah tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang Tahun 2024 s/d 2026 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan kegiatan untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan, yang dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan setiap tahun anggaran. Rencana strategis Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang merupakan dokumen yang bersifat indikatif dan menjadi pedoman bagi seluruh komponen pemerintah Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. Perubahan Renstra Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang tahun 2024-2026 sebagai gambaran tujuan, sasaran, arah kebijakan dan penjabarannya dalam program kegiatan dan sub kegiatan terkait urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan serta penataan ruang yang harus dilaksanakan guna memberikan arah pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu 2024-2026.

Perubahan Renstra Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 disusun dengan maksud sebagai penjabaran secara operasional Visi, Misi dan program Bupati/Wakil Bupati Jombang periode tahun 2024-2026 yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan serta penataan ruang yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang selama kurun waktu 2024-2026.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 adalah:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang dalam menentukan prioritas program/kegiatan tahunan yang bersumber dari APBD;
2. Menyediakan satu tolok ukur untuk pengendalian dan evaluasi kinerja tahunan Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terkait kedudukannya sebagai unsur perencana pembangunan daerah;

3. Mengoptimalkan keterpaduan dan sinkronisasi program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran dan target kinerja Kecamatan Kesamben;
4. Mendukung seluruh jajaran Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang dalam memahami arah kebijakan dan program/kegiatan operasional tahunan untuk kurun waktu 3 tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Kesamben ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KESAMBEN

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Kesamben
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Kesamben
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kesamben
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN KESAMBEN

- 3.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Kesamben
- 3.2 Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Kesamben
- 4.2 Cascading Kinerja Kecamatan Kesamben

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Kesamben

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KESAMBEN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang, Kecamatan mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas Camat sebagai unsur Staf Pemerintah Daerah/Satuan Kerja Pemerintah Daerah adalah berkedudukan membantu Kepala Daerah dalam menjalankan kewenangan yang telah dilimpahkan dalam memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan serta bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang sebagaimana Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019, terdiri dari:

- a. Camat.
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum
 2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Keuangan
- c. Seksi Tata Pemerintahan.
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan desa.
- e. Seksi Sosial Budaya
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan menurut Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Camat

Kantor Kecamatan Kesamben dipimpin oleh seorang Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program, evaluasi dan kehumasan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, sekretariat mempunyai fungsi :

- Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;

- Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- Pengelolaan administrasi keuangan;
- Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- Pengelolaan urusan rumah tangga;
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Seksi;
- Pengelolaan kearsipan dan kehumasan;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- Pelaksanaan pengelolaan aset Kecamatan; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
- Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
- Melaksanakan kegiatan pengadaan kebutuhan barang/jasa;
- Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Kecamatan;
- Menghimpun data aset dan melaksanakan ketatausahaan barang;
- Mengkoordinasikan dan menyusun Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal;
- Melaksanakan program dan pembinaan pelayanan di bidang informasi dan komunikasi;

- Melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi, dan dokumentasi; dan
- Membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi

Sub Bagian Penyusunan Keuangan, Penyusunan Program, dan Evaluasi mempunyai tugas :

- Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;
- Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;
- Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
- Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;
- Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas:

- Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
- Melaksanakan pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya;
- Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa;

- e. Melaksanakan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- f. Melaksanakan evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- g. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN);
- h. Melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat di Kecamatan;
- i. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi produk hukum desa;
- j. Melaksanakan pembinaan tata kelola keuangan desa dan aset desa;
- k. Melaksanakan pembinaan dan monitoring SID (Sistem Informasi Desa);
- l. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi penyusunan LPPDes dan LKPJ
- m. Melaksanakan tugas pembantuan; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta terhadap perangkat Desa dan Kelurahan serta tertib administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan;
- c. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi lembaga ekonomi desa seperti BUMDes, UPK, BKD, Pasar Desa; dan
- d. Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa/Kelurahan di

wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh Perangkat daerah maupun swasta;

- e. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan;
- f. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- g. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi lembaga masyarakat desa seperti PKK, LPMD, KPMD, dan Pokmas; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

5. Seksi Sosial Budaya

Seksi Sosial Budaya, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang sosial budaya;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi bidang sosial budaya;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olahraga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat;
- e. Melaksanakan koordinasi dan penanggulangan kemiskinan melalui program – program bantuan sosial;
- f. Melaksanakan penyelenggaraan PHBN dan PHBA;
- g. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan social dan pemberdayaan perempuan;
- h. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat Kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

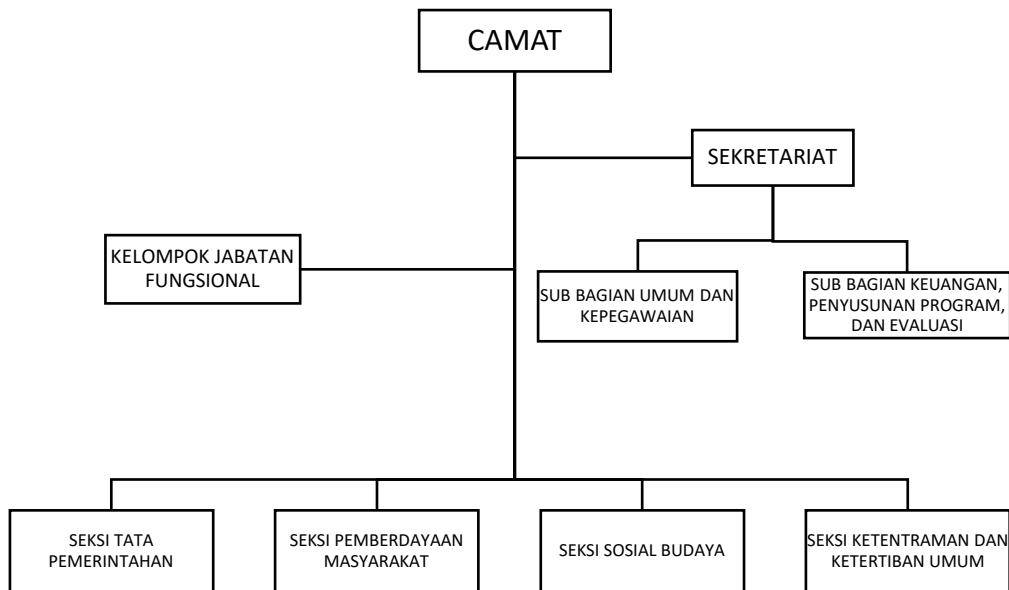
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan program guna menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan bencana;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan perangkat Kecamatan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja Kecamatan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, pihak lain termasuk TNI/POLRI dan Pemuka Agama di wilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Melaksanakan laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- i. Melaksanakan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Adapun bagan susunan organisasi Kantor Kecamatan Kesamben tersaji dalam Gambar 2.1. Sedangkan rincian personil pegawai, mulai dari jabatan eselon III dan IV, serta staf pada Kantor Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang per bulan Januari 2023 adalah sebagaimana tersaji dalam beberapa tabel berikut.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Kesamben



Sumber Data: Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019

2.2 Sumber Daya

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi pemerintah maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan institusi. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.

Aparatur Kecamatan sebagai unsur pemerintah sebagai pelayan masyarakat sudah pasti akan selalu bersinggungan dengan pemerintah desa/kelurahan, masyarakat maupun organisasi pemerintah daerah di atasnya dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan, aparatur kecamatan dituntut mempunyai kualitas dan memiliki integritas terhadap instansi kecamatan.

Kemampuan sumberdaya ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, maka untuk mencapai kondisi ideal, maka sangat diperlukan berbagai upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur dengan memberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan maupun pelatihan, baik dalam bentuk pendidikan penjenjangan maupun pendidikan formal/sekolah yang lebih tinggi, disamping itu secara periodik perlu dilakukan pembinaan baik melalui apel pagi, rapat staf dan kegiatan lainnya guna meningkatkan disiplin, motivasi kerja, kinerja, dedikasi serta loyalitas.

Berikut merupakan gambaran komposisi pegawai pada Kantor Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang saat ini bila ditinjau dari tingkat Golongan, Eselon dan Pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Komposisi Menurut Golongan/Kepangkatan

No.	Golongan	Jumlah Pegawai
1	Golongan IV	2
2	Golongan III	9
3	Golongan II	5
4	Golongan I	-
Jumlah		15

Sumber Data: SIAP ASN

Dari tabel tingkat golongan tersebut dapat terbaca, bahwa tingkat golongan dari personil Kantor Kecamatan Kesamben yang terbanyak golongan III, sebanyak 9 orang. Meskipun tingkat pendidikan dan golongan cukup secara umum untuk menangani kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang, masih diperlukan adanya tambahan tenaga pelaksana, baik dengan latar belakang teknis maupun sosial.

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Menurut Eselon

No.	Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Eselon II	-
2	Eselon III	2
3	Eselon IV	6
4	Pelaksana	9
Jumlah		16

Sumber Data: SIAP ASN

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Menurut Pendidikan

Golongan	Jumlah Pegawai
SLTA	7
Diploma (D3)	-
Sarjana (S1)	7
Magister (S2)	2
Jumlah	16

Sumber Data: SIAP ASN

Berdasarkan tabel tingkat pendidikan di atas, dapat terbaca bahwa tingkat pendidikan dari pegawai Kantor Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang yang paling banyak adalah Sarjana, yang rata-rata pada posisi Staf/Pelaksana dan memegang jabatan struktural eselon III dan IV. Peningkatan kapasitas ASN melalui peningkatan jenjang pendidikan mempengaruhi kualitas pelayanan dan pemahaman terhadap suatu perintah atau bentuk pendelegasian dan juga penguasaan teknis, baik pada tingkat konsep maupun aplikasi di lapangan. Sedangkan bila dilihat dari komposisi pegawai Kantor Kecamatan Kesamben berdasarkan pendidikan non formal adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Komposisi Pegawai Menurut Pendidikan Non Formal

No.	Jabatan	Jenis Diklat		
		Struktural / Kepemimpinan	Fungsional	Teknis
1	Struktural	Diklatpim III: 1 orang Diklatpim IV: 3 orang	-	-
2	Fungsional Khusus	-	-	-
3	Fungsional Umum	-	-	-

Sumber Data: SIAP ASN

Saat ini Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang menempati gedung kantor yang berada di Jl. Raya Kesamben No. 47 Kec. Kesamben. Adapun peralatan dan perlengkapan kantor yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Kantor Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang saat ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Inventaris Barang

No.	Nama/ Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6
I	Kendaraan Dinas Jabatan				
1	Kendaraan Dinas R4	1	1	-	-
2	Kendaraan Dinas R2	9	7	-	2
3	Mobil Siaga Desa	14	14	-	-
4	Kendaraan Dinas R2 (Desa)	28	28	-	-
II	Perlengkapan Gedung Kantor				
1	<i>Portable Water Pump</i>	1	-	-	1
2	<i>Patthem Generator</i>	1	1	-	-
3	AC	3	3	-	-
4	Mesin Tik manual	2	1	-	1
5	Rak Kayu	3	2	-	1
6	Filling Besi	8	8	-	-
7	Brandkas	1	1	-	-
8	Lemari Kaca	2	1		1
9	Papan Visual	1	1	-	-
10	Papan Nama Instansi	1	1	-	-
11	<i>White Board</i>	1	1	-	-
12	<i>Globe</i>	1	-	-	1
13	Lemari Kayu	2	1	-	1
14	<i>Zice</i>	2	1	-	1
15	Tempat Tidur Kayu	1	1	-	-
16	Meja Rapat	7	2	-	5
17	Meja Tulis	24	2	-	22
18	Meja Panjang	3	1	-	2
19	Kursi Rapat	35	35	-	-
20	Kursi Tamu	1	1	-	-
21	Kursi Putar	2	2	-	-
22	Kursi Biasa	84	60	-	24
23	Bangku Tunggu	5	2	-	3
24	Kursi Lipat	81	58	-	23
25	Jam Elektronik	2	1	-	1
26	AC Unit	1	1	-	-
27	Kipas Angin	2	1	-	1
28	Kompor Gas	1	-	-	1
29	Televisi	3	3	-	-
30	<i>Amplifier</i>	1	1	-	-
31	<i>Sound System</i>	2	2	-	-
32	<i>Wireless</i>	1	1	-	-
33	<i>Stabilizer</i>	-5	-	-	5
34	Dispenser	1	1	-	-

No.	Nama/ Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6
35	Mimbar/Podium	1	-	-	1
36	Lampu Hias	1	1	-	-
37	<i>Personal Computer</i> (PC) Unit	9	4	-	5
38	Laptop	1	1	-	-
39	<i>Notebook</i>	3	3	-	-
40	<i>Printer</i>	16	9	5	2
41	Peralatan Mini Komputer Lainnya	2	2	-	-
42	CPU	3	1		2
43	<i>Monitor</i>	3	1	2	-
44	<i>Scanner</i>	1	1	-	-
45	<i>Keyboard</i>	3	1	-	2
46	Meja Pejabat Eselon III	1	1	-	-
47	Kursi Pejabat Eselon III	1	1	-	-
48	Meja Pejabat Eselon IV	1	-	-	1
49	Kursi Pejabat Eselon IV	1	1	-	-
50	<i>Camera + Attachment</i>	1	1	-	-
51	<i>Proyektor + Attaachment</i>	1	1	-	-
52	<i>Telephone Hybrid</i>	2	-	-	2
53	<i>Camera Electric</i>	1	1	-	-
54	Mesin Penjilid	1	-	-	1
55	Tape Recorder	1	1	-	-
56	Alat Pemadam Kebakaran	3	3	-	-
57	Gedung Kantor Permanen	2	2	-	-
58	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	1	1	-	-
59	Tempat Ibadah Permanen	1	1	-	-
60	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	1	-	-
61	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1	1	-	-
62	Gedung Pos Jaga Permanen	1	1	-	-
63	RTT Golongan II Permanen Kelas Ia	1	1	-	-
64	Instalasi Pusat Pengaturan Listrik Lainnya	1	1	-	-

Sumber Data: Daftar Inventaris Barang

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja Kecamatan berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Kecamatan dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kesamben
Tahun 2018 s/d 2023

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	NILAI IKM				80,81	83,46	N/A	N/A	N/A	81,52	83,94	N/A	N/A	N/A	100,88	100,58	N/A	N/A	N/A
2	Nilai Sinergitas Kecamatan Kesamben Minimal BAIK				70	71	N/A	N/A	N/A	68,08	73,02	N/A	N/A	N/A	97,26	102,85	N/A	N/A	N/A
3	Jumlah pemenuhan komponen sinergitas kinerja bidang pemerintahan umum dan desa				22	22	N/A	N/A	N/A	22	22	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
4	Jumlah pemenuhan komponen sinergitas kinerja bidang ketentraman dan ketertiban umum				8	8	N/A	N/A	N/A	8	8	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
5	Jumlah pemenuhan komponen sinergitas kinerja bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				11	11	N/A	N/A	N/A	11	11	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
6	Jumlah pemenuhan komponen sinergitas kinerja Bidang Sosial dan Budaya				16	16	N/A	N/A	N/A	16	16	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
7	Nilai Evaluasi SAKIP				62,5	63,26	N/A	N/A	N/A	61,42	60,3	N/A	N/A	N/A	98,27	95,32	N/A	N/A	N/A
8	Persentase penunjang kelancaran administrasi perkantoran				100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
9	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran				18	18	N/A	N/A	N/A	18	18	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
10	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan				100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
11	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/ operasional				-	-	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
12	Luas gedung kantor/ bangunan pendukungnya yang terbangun				190	210	N/A	N/A	N/A	190	210	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
13	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor				3	2	N/A	N/A	N/A	3	2	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
14	Luas gedung kantor/ bangunan pendukungnya yang dipelihara				145	176	N/A	N/A	N/A	145	176	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
15	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara				16	16	N/A	N/A	N/A	16	16	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
16	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara				1	1	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
17	Jumlah pengadaan pakaian olahraga dan Pakaian Dinas Harian				23	-	N/A	N/A	N/A	23	-	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
18	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan				100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
19	Jumlah Dokumen Renstra Kec. Kesamben yang tersusun				-	-	N/A	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
20	Jumlah Dokumen Renja Kec. Kesamben yang tersusun				2	2	N/A	N/A	N/A	2	2	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
21	Jumlah dokumen Laporan LKJIP yang tersusun				1	1	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
22	Jumlah dokumen laporan keuangan Kec. Kesamben yang tersusun				2	2	N/A	N/A	N/A	2	2	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
23	INDEKS REFORMASI BIROKRASI				N/A	N/A	66	73,39	76	N/A	N/A	60,69	61,16	N/A	N/A	N/A	92,26	84,22	N/A
24	Nilai SAKIP				62,5	63,26	70,01	70,5	71,5	61,42	60,3	71,27	72	N/A	98,37	95,32	101,80	100,7	N/A
25	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur				N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
26	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan				N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
27	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun				N/A	N/A	3	2	2	N/A	N/A	3	2	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
28	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun				N/A	N/A	5	5	5	N/A	N/A	5	5	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
29	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu				N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
30	Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan				N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
31	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN lingkup Kecamatan Kesamben yang difasilitasi				N/A	N/A	14	14	14	N/A	N/A	14	14	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
32	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD				N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
33	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD				N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
34	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Kesamben				N/A	N/A	16	N/A	N/A	N/A	N/A	16	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	16
35	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terfasilitasi				N/A	N/A	16	N/A	N/A	N/A	N/A	16	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	16
36	<i>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</i>				N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	100
37	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi				N/A	N/A	2	N/A	N/A	N/A	3	2	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	2
38	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi				N/A	N/A	11	N/A	11	N/A	N/A	11	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
39	Jumlah pemenuhan barang cetak				N/A	N/A	12	12	12	N/A	N/A	12	12	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
40	Jumlah pemenuhan barang penggandaan				N/A	N/A	4000	5619	7000	N/A	N/A	4000	5619	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
41	Jumlah Pemenuhan Bahan Bacaan				N/A	N/A	1	1	1	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
42	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				N/A	N/A	3	4	6	N/A	N/A	3	4	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
43	Jumlah komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi.				N/A	N/A	6	6	N/A	N/A	N/A	6	6	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
44	<i>Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur</i>				N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
45	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
46	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor				N/A	N/A	13	2	6	N/A	N/A	13	2	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
47	<i>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i>				N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
48	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi				N/A	N/A	12	12	12	N/A	N/A	12	12	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
49	Jumlah Pemenuhan jenis Pelayanan Umum				N/A	N/A	5	4	2	N/A	N/A	5	4	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
50	Jumlah penyediaan benda pos				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
51	<i>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</i>				N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
52	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara				N/A	N/A	1	1	1	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
53	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya.				N/A	N/A	6	6	6	N/A	N/A	6	6	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
54	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Kesamben yang dipelihara				N/A	N/A	1	1	1	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
55	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara				N/A	N/A	16	16	18	N/A	N/A	16	16	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
56	INDEKS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				N/A	N/A	7,5	7,6	7,7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
57	IKM Kecamatan Kesamben				N/A	N/A	84,16	88	88,5	N/A	N/A	87,41	85,48	N/A	N/A	N/A	103,86	97,14	N/A
58	IPP Kecamatan Kesamben				N/A	N/A	3,2	3,3	3,4	N/A	N/A	3,247	2,13	N/A	N/A	N/A	101,47	64,55	N/A
59	Nilai Paten Kecamatan				N/A	N/A	73	75	76	N/A	N/A	74,61	77,5	N/A	N/A	N/A	102,26	103,33	N/A
60	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar				N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
61	Persentase pengajuan pelayanan Adminduk yang diverifikasi				N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
62	Persentase pengajuan perizinan yang diverifikasi				N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
63	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan				N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
64	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti				N/A	N/A	0	100	100	N/A	N/A	0	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
65	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA				N/A	N/A	1	1	1	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
66	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam				N/A	N/A	4	4	4	N/A	N/A	4	4	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
67	Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan				N/A	N/A	1	1	1	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
68	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Forkopimcam				N/A	N/A	4	4	4	N/A	N/A	4	4	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
69	Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait				N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
70	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait				N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
71	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum				N/A	N/A	12	12	12	N/A	N/A	12	12	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
72	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan				N/A	N/A	12	12	12	N/A	N/A	12	12	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
73	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tepat Waktu				N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
74	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa				N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
75	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti				N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
76	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa				N/A	N/A	28	28	28	N/A	N/A	28	28	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
77	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa				N/A	N/A	28	28	28	N/A	N/A	28	28	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
78	Persentase Evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu				N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
79	Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi				N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
80	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif				N/A	N/A	28	28	28	N/A	N/A	28	28	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
81	Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu				N/A	N/A	28	28	28	N/A	N/A	28	28	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
82	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina				N/A	N/A	28	28	28	N/A	N/A	28	28	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
83	Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa				N/A	N/A	28	28	28	N/A	N/A	28	28	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
84	Jumlah BUMDesa yang dikoordinasikan				N/A	N/A	14	14	14	N/A	N/A	14	14	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
85	Jumlah TP PKK yang dikoordinasikan				N/A	N/A	14	14	14	N/A	N/A	14	14	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A
86	INDEKS REFORMASI BIROKRASI				N/A	N/A	N/A	NA	76	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
87	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Kesamben				N/A	N/A	N/A	N/A	72,5	61,42	60,3	71,27	N/A	N/A	98,37	95,32	101,80	N/A	N/A
88	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
89	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
90	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun				N/A	N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
91	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				N/A	N/A	N/A	N/A	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
92	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
93	Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
94	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				N/A	N/A	N/A	N/A	15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
95	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
96	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
97	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Kesamben				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
98	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				N/A	N/A	N/A	N/A	15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
99	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
100	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
101	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	N/A	11	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
102	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
103	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
104	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				N/A	N/A	N/A	N/A	6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
105	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Ka				N/A	N/A	N/A	N/A	6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
106	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
107	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
108	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
109	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
110	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
111	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
112	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
113	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
114	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				N/A	N/A	N/A	N/A	6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
115	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
116	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				N/A	N/A	N/A	N/A	16	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
117	INDEKS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				N/A	N/A	N/A	N/A	7,7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
118	IKM Kecamatan Kesamben				N/A	N/A	N/A	N/A	88,5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
119	IPP Kecamatan Kesamben				N/A	N/A	N/A	N/A	3,4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
120	Nilai Paten Kecamatan				N/A	N/A	N/A	N/A	78	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
121	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
122	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
123	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
124	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
125	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA				N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
126	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam				N/A	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
127	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
128	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				N/A	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
129	Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
130	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
131	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
132	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan				N/A	N/A	N/A	N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
133	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tepat Waktu				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
134	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
135	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
136	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa				N/A	N/A	N/A	N/A	28	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
137	Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				N/A	N/A	N/A	N/A	28	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
138	Persentase Evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
139	Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi				N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
140	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif				N/A	N/A	N/A	N/A	28	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
141	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				N/A	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
142	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina				N/A	N/A	N/A	N/A	28	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Kesamben
Kabupaten Jombang Tahun 2018 -2023

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan administrasi perkantoran	305.014.099	229.884.000	N/A	N/A	N/A	285.486.376	220.605.186	N/A	N/A	N/A	93,6	95,6	N/A	N/A	N/A	- 24,63	- 22,7
Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	305.014.099	229.884.000	N/A	N/A	N/A	285.486.376	220.605.186	N/A	N/A	N/A	93,6	95,6	N/A	N/A	N/A	- 24,63	- 22,7
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	472.199.904	354.590.100	N/A	N/A	N/A	469.412.200	342.790.100	N/A	N/A	N/A	99,41	96,67	N/A	N/A	N/A	- 24,91	- 26,97
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional			N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A		
Pembangunan gedung kantor / bangunan pendukungnya	210.000.000	300.213.100	N/A	N/A	N/A	209.198.000	288.597.100	N/A	N/A	N/A	99,61	96,13	N/A	N/A	N/A	42,96	37,95
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	64.999.780	30.010.000	N/A	N/A	N/A	64.000.000	29.826.000	N/A	N/A	N/A	98,46	99,39	N/A	N/A	N/A	- 53,86	- 53,40
Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya	170.000.124	10.867.000	N/A	N/A	N/A	169.365.000	10.867.000	N/A	N/A	N/A	99,62	100	N/A	N/A	N/A	- 93,67	- 93,58
Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor	8.500.000	8.500.000	N/A	N/A	N/A	8.500.000	8.500.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	0	0
Pemeliharaan rutin/berkala/	9.500.000	5.000.000	N/A	N/A	N/A	9.415.000	5.000.000	N/A	N/A	N/A	99,11	100	N/A	N/A	N/A	- 47,37	- 46,89

sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional																	
Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya	9.200.000		N/A	N/A	N/A	9.200.000		N/A	N/A	N/A	100		N/A	N/A	N/A	-100,00	-100,00
Program Perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD	26.740.000	12.064.500	N/A	N/A	N/A	24.740.000	12.064.500	N/A	N/A	N/A	92,52	100	N/A	N/A	N/A	- 54,88	- 51,23
Penyusunan rencana strategis SKPD		500.000	N/A	N/A	N/A		500.000	N/A	N/A	N/A		100	N/A	N/A	N/A	100	100
Penyusunan Rencana Kerja SKPD	15.000.000	9.500.000	N/A	N/A	N/A	13.000.000	9.500.000	N/A	N/A	N/A	86,67	100	N/A	N/A	N/A	-36,67	- 26,92
Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD	8.000.000		N/A	N/A	N/A	8.000.000		N/A	N/A	N/A	100		N/A	N/A	N/A	- 100,00	- 100,00
Penyusunan laporan keuangan SKPD	3.740.000	2.064.500	N/A	N/A	N/A	3.740.000	2.064.500	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	-44,80	- 44,80
Program Fasilitas dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan	172.550.000	46.820.500	N/A	N/A	N/A	172.550.000	46.808.000	N/A	N/A	N/A	100	99,97	N/A	N/A	N/A	- 72,87	- 72,87
Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	24.500.000	5.560.000	N/A	N/A	N/A	24.500.000	5.560.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	- 77,31	- 77,31
Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	57.400.000	30.787.500	N/A	N/A	N/A	57.400.000	30.775.000	N/A	N/A	N/A	100	99,96	N/A	N/A	N/A	- 46,36	- 46,39
Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan	42.250.000	1.973.000	N/A	N/A	N/A	42.250.000	1.973.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	- 95,33	- 95,33

Pemerintahan Bidang Sosial Budaya																	
Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Desa	48.400.000	8.500.000	N/A	N/A	N/A	48.400.000	8.500.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	- 82,44	- 82,44
Program: Penunjang Urusan Pemerintahanan Daerah Kabupaten/ kota	N/A	N/A	2.675.800.630	2.633/595.879	2.871.529.030	N/A	N/A	2.24.196.495	2.369.060.955	N/A	N/A	N/A	83,12	89,96	N/A	6,82	N/A
Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	N/A	N/A	6.107.000	2.135.500	14.000.000	N/A	N/A	6.107.000	2.105.500	N/A	N/A	N/A	100	98,6	N/A	236,89	N/A
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	N/A	N/A	3.625.000	955.500	9.000.000	N/A	N/A	3.625.000	955.500	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	376,55	N/A
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	N/A	N/A	2.482.000	1.180.000	5.000.000	N/A	N/A	2.482.000	1.150.000	N/A	N/A	N/A	100	97,46	N/A	130,41	N/A
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	N/A	N/A	2.240.051.030	2.217.468.279	2.311.659.030	N/A	N/A	1.791.350.425	1.856.962.594	N/A	N/A	N/A	79,97	88,25	N/A	1,5	N/A
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	N/A	N/A	2.238.661.030	2.146.770.279	2.238.661.030	N/A	N/A	1.789.960/425	1.886.264.594	N/A	N/A	N/A	89,96	87,87	N/A	0	N/A
Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	N/A	N/A	N/A	70.398.000	70.398.000	N/A	N/A	N/A	70.398.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A

Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	N/A	N/A	1.390.000	300.000	5.000.000	N/A	1.390.000	300.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	735,97	N/A
Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	4.200.000	8.400.000	N/A	N/A	4.200.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	N/A	N/A	N/A	4.200.000	8.400.000	N/A	N/A	4.200.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	N/A	N/A	84.748,100	26.188,500	92.820.000	N/A	N/A	84,509.100	26.008.500	N/A	N/A	N/A	99,72	99,31	N/A	193,57	N/A
Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	N/A	N/A	1.865.500	3.264.000	4.000.000	N/A	N/A	1.865.500	3.264.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	N/A	N/A	13.972.100	15.134.500	19.000.000	N/A	N/A	13.972.100	15.134.500	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	50,13	N/A
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	N/A	N/A	46.200.000	0	46.000.000	N/A	N/A	46.170.000	N/A	N/A	N/A	N/A	99,94	N/A	N/A	#VALUE!	N/A
Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	N/A	N/A	2.750.000	1.890.000	4.600.000	N/A	N/A	2.750.000	1.890.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	88,96	N/A
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	N/A	N/A	2.220.000	2.400.000	2.400.000	N/A	N/A	2.220.000	2.400.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	4,05	N/A
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	N/A	N/A	17.740.500	3.500.000	12.000.000	N/A	N/A	17.531.500	3.320.000	N/A	N/A	N/A	98,82	94,86	N/A	N/A	N/A

Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	N/A	N/A	196.072.500	8.800.000	275.000.000	N/A	N/A	193.700.000	7.800.000	N/A	N/A	N/A	98,79	88,64	N/A	4493,4	N/A
Sub Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	N/A	175.000.000	N/A	210.000.000	N/A	N/A	172.800.000	N/A	N/A	N/A	N/A	98,74	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	N/A	21.072.500	8.800.000	65.000.000	N/A	N/A	20.900.000	7.800.000	N/A	N/A	N/A	99,18	88,64	N/A	993,4	N/A
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	N/A	95.036.000	113.000.000	115.850.000	N/A	N/A	95.031.580	112.768.561	N/A	N/A	N/A	100	99,8	N/A	-10,71	N/A
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	N/A	N/A	29.000.000	33.800.000	30.600.000	N/A	N/A	29.000.000	33.568.561	N/A	N/A	N/A	100	99,32	N/A	-33,9	N/A
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	N/A	N/A	66.036.000	79.200.000	85.250.000	N/A	N/A	66.031.580	79.200.000	N/A	N/A	N/A	99,99	100	N/A	-15,5	N/A
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	N/A	53.786.000	261.803.600	53.800.000	N/A	N/A	53.498.390	259.215.800	N/A	N/A	N/A	99,47	99,01	N/A	4,65	N/A
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas	N/A	N/A	32,430.000	28,519.000	27.300.000	N/A	N/A	32.142.390	28.392.300	N/A	N/A	N/A	99,11	99,56	N/A	-3,68	N/A

Operasional atau lapangan																	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	N/A	N/A	11.356.000	223.134.600	16.500.000	N/A	N/A	11.356.000	220.673.500	N/A	N/A	N/A	100	98,9	N/A	22,65	N/A
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	N/A	10.000.000	10.150.000	10.000.000	N/A	N/A	10.000.000	10.150.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	8,6	N/A
Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	N/A	N/A	21.565.000	10.312.800	36.400.000	N/A	N/A	21.565.000	10.312.800	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	84,3	N/A
Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	N/A	N/A	21.565.000	10.312.800	36.400.000	N/A	N/A	21.565.000	10.312.800	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	84,3	N/A
Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	N/A	N/A	21.565.000	10.312.800	36.400.000	N/A	N/A	21.565.000	10.312.800	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	84,3	N/A
Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	N/A	N/A	28.378.500	5.672.000	53.700.000	N/A	N/A	28.378.500	5.672.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	11,96	N/A
Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	N/A	N/A	28.378.500	5.672.000	53.700.000	N/A	N/A	28.378.500	5.672.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	11,96	N/A
Sub Kegiatan: Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan	N/A	N/A	28.378.500	700.000	53.700.000	N/A	N/A	28.378.500	700.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	-10,11	N/A

Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	N/A	N/A	N/A	700.000	23.700.000	N/A	N/A	N/A	700.000	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A
Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	N/A	N/A	14.277.500	2.272.000	20.432.000	N/A	N/A	14.277.500	2.272.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	355,39	N/A
Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	N/A	N/A	14.277.500	2.272.000	20.432.000	N/A	N/A	14.277.500	2.272.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	355,39	N/A
Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	N/A	N/A	14.277.500	2.272.000	20.432.000	N/A	N/A	14.277.500	2.272.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	355,39	N/A
Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	N/A	N/A	25.187.500	4.972.000	29.600.000	N/A	N/A	24.187.500	4.972.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	205,22	N/A
Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	N/A	N/A	25.187.500	4.972.000	29.600.000	N/A	N/A	24.187.500	4.972.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	205,22	N/A
Sub Kegiatan: Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	N/A	N/A	25.187.500	4.972.000	29.600.000	N/A	N/A	24.187.500	4.972.000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	205,22	N/A

Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	N/A	N/A	47.277.500	23.258.500	53.700.000	N/A	N/A	47.277.500	23.258.500	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	101,38	N/A
Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	N/A	N/A	47.277.500	23.258.500	53.700.000	N/A	N/A	47.277.500	23.258.500	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	101,38	N/A
Sub Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	N/A	N/A	47.277.500	23.258.500	53.700.000	N/A	N/A	47.277.500	23.258.500	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	N/A	N/A	N/A	N/A	2.871.529.030	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	14.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	9.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	N/A	N/A	N/A	N/A	5.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	2.311.659.030	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	N/A	N/A	N/A	N/A	2.238.661.030	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	N/A	N/A	N/A	N/A	67.998.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	N/A	N/A	N/A	N/A	5.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	8.400.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	N/A	N/A	N/A	N/A	8.400.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	92.820.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	N/A	N/A	N/A	N/A	4.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	N/A	N/A	N/A	N/A	19.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : Penyediaan Barang	N/A	N/A	N/A	N/A	4.600.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Cetakan dan Penggandaan																	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	N/A	N/A	N/A	N/A	2.400.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	N/A	N/A	N/A	N/A	12.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	275.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	N/A	N/A	N/A	210.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	N/A	N/A	N/A	65.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	115.850.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	N/A	N/A	N/A	N/A	30.600.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	N/A	N/A	N/A	N/A	85.250.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	53.800.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	N/A	N/A	N/A	N/A	27.300.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	N/A	N/A	N/A	N/A	16.500.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	N/A	N/A	N/A	10.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	N/A	N/A	N/A	N/A	36.400.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	N/A	N/A	N/A	N/A	36.400.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	N/A	N/A	N/A	N/A	36.400.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	N/A	N/A	N/A	N/A	53.700.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Penyelenggaraan	N/A	N/A	N/A	N/A	53.700.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah																	
Sub Kegiatan: Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	N/A	N/A	N/A	N/A	30.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	N/A	N/A	N/A	N/A	23.700.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	N/A	N/A	N/A	N/A	20.432.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	20.432.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	N/A	N/A	N/A	N/A	20.432.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	N/A	N/A	N/A	N/A	29.600.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	N/A	N/A	N/A	N/A	29.600.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	N/A	N/A	N/A	N/A	29.600.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	N/A	N/A	N/A	N/A	54.200.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	N/A	N/A	N/A	N/A	54.200.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	N/A	N/A	N/A	N/A	54.200.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Pelaksanaan otonomi daerah telah membawa perubahan yang signifikan kepada instansi pemerintah daerah, salah satu yang mengalami perubahan adalah kecamatan. Kedudukan camat berubah dari sebelumnya camat berperan sebagai kepala wilayah beralih menjadi perangkat daerah. Selain kecamatan, desa juga mengalami perubahan akibat pelaksanaan otonomi daerah. Desa setelah pelaksanaan otonomi dapat memiliki otonominya sendiri dan bebas mengatur pemerintahannya sesuai dengan kearifan lokal yang dimilikinya. Perubahan status dan kedudukan camat dan desa juga membawa perubahan terhadap hubungan kerja yang terjalin antara camat dengan kepala desa. Hubungan camat dengan kepala desa yang sebelumnya berupa hubungan yang bersifat hierarkis berubah menjadi hubungan kerja yang bersifat fasilitatif, koordinatif, hubungan kerjasama dan pembinaan dan pengawasan.

Desa yang merupakan kelompok sasaran layanan kecamatan, dalam hal ini kecamatan berperan sebagai fasilitator yang sesuai dengan pasal 98 ayat (2) PP Nomor 72 Tahun 2005 Pemerintah Kabupaten/Kota dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan. Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, meliputi:

1. Memfasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa
2. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan Desa
3. Memfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa
4. Memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada Desa
5. Memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
6. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa
7. Memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
8. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan
9. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
10. Memfasilitasi kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga

11. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa
12. Memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga
13. Memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan
14. Memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

Selain desa, kelompok penerima layanan kecamatan adalah Masyarakat, dalam Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat. Pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Camat meliputi;

1. Pelayanan bidang perizinan
2. Pelayanan bidang non perizinan

Pedoman pelayanan kecamatan kepada masyarakat diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Dalam pasal 4 PATEN mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

2.4.1 Mitra Perangkat Daerah

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum lingkup kecamatan, mitra Kecamatan dalam pelaksanaan pelayanan di wilayah Kecamatan adalah Kepala Kepolisian Sektor (Polsek) dan Komandan Komando Rayon Militer (Koramil) yang terbentuk dalam Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam). Forkopimcam menurut Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2022 mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;

4. Koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
5. Koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan untuk permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
7. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan wilayah kecamatan dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN KESAMBEN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Seiring dengan perkembangan kebijakan yang terjadi pada tahun 2016 dimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa Kecamatan sebagai satuan kerja perangkat daerah yang wajib menyusun dokumen perencanaan melalui proses perencanaan yang memadukan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif serta *bottom up* dan *top down*.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Kecamatan Kesamben selama kurun waktu lima tahun ke belakang, tantangan dan peluang yang ada, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi, yaitu:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Sumber Daya Manusia (SDM)	Terbatasnya jumlah aparatur sipil di Kecamatan Kesamben yang mempengaruhi efisiensi pelayanan.	Jumlah personil ASN di Kecamatan Kesamben hanya 16 pegawai
		Kompetensi personil aparatur pelayanan yang masih rendah teknis tertentu	Minimnya diklat dan pembinaan yang mengikutsertakan para personil Kecamatan
2.	Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan	Terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang kinerja pelayanan	Sarana dan Prasarana pelayanan PATEN Kecamatan

			Kesamben belum memenuhi kriteria Zona Integritas (ZI)
3.	Pelayanan	Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.	Masyarakat yang semakin kritis mengharapkan pelayanan harus menerapkan prinsip <i>good governance</i>
4.	Rendahnya penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tupoksi kecamatan	Belum ada sistem informasi yang dapat di akses oleh seluruh Desa / masyarakat	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap alur pelayanan di Kecamatan

3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan Jombang yang sejalan dengan Tupoksi Kecamatan Kesamben dapat dikategorikan dalam uraian-uraian dibawah ini:

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

Fasilitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik masih sangat minim untuk mendukung pelayanan menuju Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), fasilitas sarana dan prasarana pelayanan publik yang kurang di Kecamatan Kesamben adalah sarana bermain anak yang memadai, area parkir yang aman dan nyaman dan kantin pelayanan.

2. Penyusunan RKPDes tidak tepat waktu

Desa masih terlambat dalam penyusunan RKPDes, seharusnya RKPDes disusun paling lambat tanggal 30 September masih banyak Desa yang belum mengumpulkan RKPDes. Karena kurangnya koordinasi antara pihak DPMD, Kecamatan serta desa sangat mempengaruhi keterlambatan dalam penyusunan RKPDes

3. Pembinaan Badan Usaha dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kurangnya pembinaan Desa terhadap Badan Usaha dan Lembaga Pemberdayaan Desa sehingga kurang berkembang dan tidak dapat berjalan sebagaimana fungsinya.

4. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBDes tidak tepat waktu

Desa dalam menyusun laporan Pertanggungjawaban APBDes masih terlambat seharusnya Laporan Pertanggungjawaban APBDes di susun dan dilaporkan ke kecamatan paling lambat tanggal 3 minggu setelah berakhir tahun anggaran.

5. Kompetensi Aparatur Pelayanan Publik

Masih rendahnya kualitas dan kompetensi SDM yang ada di Kecamatan Kesamben karena masih minimnya diklat dan bimbingan teknis yang dapat diikuti oleh pegawai

Dari deskripsi permasalahan-permasalahan berdasarkan urusan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa isu strategis kecamatan adalah “Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan”.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Kesamben

Bahwasanya Tujuan dan sasaran Kecamatan Kesamben mendukung tercapainya tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang merupakan cita-cita atau sesuatu yang akan dicapai dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat secara optimal.

Tujuan yang akan diwujudkan adalah ***Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik.***

Pernyataan tujuan dan sasaran Jangka menengah Kecamatan Kesamben beserta indikatornya disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kesamben

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-		
				1	2	3
	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan	62	63	64
		1. Meningkatnya akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	1. Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Kesamben	73	74	75
			Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten	62,00	63,45	65,00
		2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	2. Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Kesamben	6.6	6,7	6,8

4.2 Cascading Kinerja

Penyusunan Renstra Perangkat harus memperhatikan sinkronisasi dan keselarasan tujuan, sasaran dan program perangkat daerah, dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Cascading Renstra Kecamatan Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Cascading Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kab. Jombang Tahun 2024-2026

TUJUAN RPD	INDIKATOR TUJUAN RPD	SASARAN RPD	INDIKATOR SASARAN RPD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik	Indeks Good Governance (IGG)	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Kesamben	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	1. Nilai Evaluasi AKIP Kec. Kesamben	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
												2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

										Administra si Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
												2. Pelaksanaan penatausaha an dan pengujian/veri fikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausaha an dan Pengujian/V erifikasi Keuangan SKPD
											2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
										Administra si Kepegawai an Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Kesamben	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapanny a	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
										Administra si Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	1. Penyedian komponen instalasi listrik/peneran gan bangunan kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan

												2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
												3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
												4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
												5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
												6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

										Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
												2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
										Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
												2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
												3. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

										Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
												2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi
												3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi
					Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten	2. Meningkatnya kualitas Layanan Publik	2. Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

								Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
									Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti		Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
								Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

								Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah n Desa	Persentase Laporan Pertanggungj awaban Realisasi APB Desa Tepat Waktu	Fasilitasi, Rekomend asi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasa n Pemerintah an Desa	Jumlah Desa yang melaporkan pertanggungja waban APBDes dengan lengkap	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaa n Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayaguna an Aset Desa
								Program Pemberdaya an Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembanguna n dan Lembaga Pemberdayaa n Masyarakat yang aktif	Koordinasi Kegiatan Pemberday aan Desa	Jumlah Lembaga/Bada n Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan
											Jumlah Desa yang menyusun RKPDDes	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyaraka tan yang berpartisipas i dalam forum musyawarah perencanaan pembanguna n di Desa

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Kecamatan sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor *strategi* yaitu tantangan dan peluang yang diperoleh melalui pendekatan analisis SWOT (*Strengths. Weaknesses, Opportunities, Treaths*).

Strategi mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi unit kerja yang berisi rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Kebijakan Kecamatan tidak bisa berdiri sendiri dan terlepas dari kebijakan Pemerintah Kabupaten, maka kebijakan yang dilaksanakan oleh Kecamatan adalah: Meningkatkan Pelayanan di Bidang Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Keamanan, Ketertiban, Pelayanan Umum serta pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa.

1. Peluang

- a. Undang-Undang mengenai Kecamatan yang menyatakan bahwa perlunya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati guna menunjang pelayanan prima.
- b. Masyarakat aktif terlibat dalam proses perumusan kebijakan publik dalam musrenbang Kecamatan
- c. Peluang kerjasama yang besar dengan pemerintah Desa dalam rangka mengembangkan potensi Kecamatan
- d. Peluang penataan dan pengembangan kawasan industri manufaktur non polutan yang sesuai dengan arah RTRW.

2. Ancaman

- a. Tumpang tindihnya Tupoksi Kecamatan dengan SKPD teknis lainnya bilamana terjadi sebagian pelimpahan kewenangan Bupati Kepada Camat

- b. Masyarakat banyak yang apatis untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan yang dibahas dalam musrenbang Kecamatan
- c. Wujud kerjasama Kecamatan dengan Pemerintah Desa seringkali mengalami kesulitan dalam hal koordinasi antar Pemerintah Desa dalam satu Kecamatan
- d. Ancaman masalah pengembangan kawasan industri non polutan terhadap lokasi yang strategis sesuai dengan kebutuhan investor dan kekhawatiran adanya alih fungsi lahan produktif.

3. Kekuatan

- a. Adanya kewenangan yang sangat strategis dalam bidang koordinasi dan fasilitasi pembangunan antar Desa dalam satu Kecamatan guna menunjang
- b. SDM secara kapasitas terbilang cukup mumpuni dalam hal pemberian pelayanan maupun dalam menjalankan administrasi pemerintahan umum
- c. Tersedianya lahan yang dapat digunakan untuk menunjang arah rencana pembangunan kawasan industri non polutan
- d. Adanya alokasi anggaran yang tersedia bagi Kecamatan dalam menjalankan tupoksinya.

4. Kelemahan

- a. Terbatasnya kewenangan Kecamatan dalam menjalankan pelayanan perijinan dan non-perijinan yang selama ini masih dilaksanakan oleh SKPD teknis yang bersangkutan.
- b. Belum meratanya tingkat kompetensi SDM dalam mengemban mandat kewenangan organisasi yang sangat strategis.
- c. Sudah tidak memadainya beberapa sarana pendukung kantor dalam menunjang kelancaran fungsi organisasi.
- d. Alokasi anggaran Kecamatan yang terbatas dirasa kurang menunjang perencanaan pembangunan Kecamatan kedepan.
- e. Infrastruktur Kecamatan yang masih perlu peningkatan guna menarik investor dan percepatan pembangunan ekonomi masyarakat.

IFAS EFAS	<u>Kekuatan (Strengths) :</u> - Adanya kewenangan yang sangat strategis dalam bidang koordinasi dan fasilitasi pembangunan antar Desa dalam satu Kecamatan guna menunjang - SDM secara kapasitas terbilang cukup mumpuni dalam hal pemberian pelayanan maupun dalam menjalankan administrasi pemerintahan umum - Tersedianya lahan yang dapat digunakan untuk menunjang arah rencana pembangunan kawasan industri non polutan - Adanya alokasi anggaran yang tersedia bagi Kecamatan dalam menjalankan tupoksinya.	<u>Kelemahan (Weaknesses) :</u> - Terbatasnya kewenangan Kecamatan dalam menjalankan pelayanan perijinan dan non-perijinan yang selama ini masih dilaksanakan oleh SKPD teknis yang bersangkutan. - Belum meratanya tingkat kompetensi SDM dalam mengemban mandat kewenangan organisasi yang sangat strategis. - Sudah tidak memadainya beberapa sarana pendukung kantor dalam menunjang kelancaran fungsi organisasi. - Alokasi anggaran Kecamatan yang terbatas dirasa kurang menunjang perencanaan pembangunan Kecamatan kedepan. - Infrastruktur Kecamatan yang masih perlu peningkatan guna menarik investor dan percepatan pembangunan ekonomi masyarakat.
<u>Peluang (Opportunities) :</u> Undang-Undang mengenai Kecamatan yang menyatakan bahwa perlunya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati	<u>Strategi SO</u> - Meningkatkan penyelenggaraan administrasi Kecamatan yang akuntabel - Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mewujudkan pelayanan prima	<u>Strategi WO</u> - Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa - Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah

guna menunjang pelayanan prima. b. Masyarakat aktif terlibat dalam proses perumusan kebijakan publik dalam musrenbang Kecamatan c. Peluang kerjasama yang besar dengan pemerintah Desa dalam rangka mengembangkan potensi Kecamatan d. Peluang penataan dan pengembangan kawasan industri manufaktur non polutan yang sesuai dengan arah RTRW.	3) Pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan kapasitas sumber daya aparatur 4) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran 5) Meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan 6) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur.	3) Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan 4) Peningkatan partisipasi aparatur Kecamatan dalam kegiatan keagamaan.
--	---	---

<u>Ancaman (Threats) :</u>	<u>Strategi ST</u>	<u>Strategi WT</u>
a. Tumpang tindihnya Tupoksi Kecamatan dengan SKPD teknis lainnya bilamana terjadi sebagian pelimpahan kewenangan Bupati Kepada Camat b. Masyarakat banyak yang apatis untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan yang dibahas	1) Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran. 2) Mengoptimalkan fungsi koordinasi Pemerintahan Kecamatan 3) Mengoptimalkan kinerja pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan 4) Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Kecamatan	1) Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa 2) Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah 3) Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan 4) Pengembangan produk lokal masyarakat sesuai potensi Kecamatan.

dalam musrenbang Kecamatan c. Wujud kerjasama Kecamatan dengan Pemerintah Desa seringkali mengalami kesulitan dalam hal koordinasi antar Pemerintah Desa dalam satu Kecamatan d. Ancaman masalah pengembangan kawasan industri non polutan terhadap lokasi yang strategis sesuai dengan kebutuhan investor dan kekhawatiran adanya alih fungsi lahan produktif.	5) Meningkatkan jangkauan informasi potensi dan informasi prosedur pelayanan yang diterima masyarakat 6) Meningkatkan pembinaan kerukunan bermasyarakat 7) Meningkatkan kegiatan seni, budaya, keagamaan, dan wawasan kebangsaan di masyarakat 8) Meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan Kecamatan.	
--	---	--

Strategi adalah langkah–langkah yang berisi program–program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan, adapun strategi Kecamatan yaitu :

1. Meningkatkan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan
2. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mewujudkan pelayanan prima
3. Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Kecamatan
4. Pengembangan produk lokal masyarakat sesuai potensi Kecamatan
5. Meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan Kecamatan
6. Meningkatkan pembinaan kerukunan bermasyarakat
7. Meningkatkan kegiatan seni, budaya, keagamaan, dan wawasan kebangsaan di masyarakat
8. Meningkatkan jangkauan informasi potensi dan informasi prosedur pelayanan yang diterima masyarakat.

Kebijakan adalah arah / tindakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Kebijakan – kebijakan Kecamatan yaitu :

1. Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat terkait pelayanan perijinan dan non perijinan
2. Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur di bidang IPTEK dan IMTAQ
3. Perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Kecamatan yang partisipatif
4. Pengembangan potensi Kecamatan berbasis produk unggulan di tiap Desa (One Village One Product)
5. Sosialisasi dan optimalisasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
6. Pengembangan kegiatan seni, budaya, dan keagamaan yang berorientasi pada wawasan kebangsaan
7. Optimalisasi penyajian data dan informasi

Rumusan sasaran, strategi,dan kebijakan yang akan dilaksanakan sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

TUJUAN RPD: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
eningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi	1. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Meningkatkan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan - Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Kecamatan - Pengembangan produk lokal masyarakat sesuai potensi Kecamatan - Meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan Kecamatan - Meningkatkan pembinaan kerukunan bermasyarakat - Meningkatkan kegiatan seni, budaya, keagamaan, dan wawasan kebangsaan di masyarakat	- Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat terkait pelayanan perijinan dan non perijinan - Perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Kecamatan yang partisipatif - Pengembangan potensi Kecamatan berbasis produk unggulan di tiap Desa (One Village One Product) - Sosialisasi dan optimalisasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum - Pengembangan kegiatan seni, budaya, dan keagamaan yang berorientasi pada wawasan kebangsaan
	2. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan instansi pemerintah	- Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mewujudkan pelayanan prima. - Meningkatkan jangkauan informasi potensi dan informasi prosedur pelayanan yang diterima masyarakat.	- Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur di bidang IPTEK dan IMTAQ - Optimalisasi penyajian data dan informasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap lingkungan strategis.

Guna menghadapi tantangan tersebut perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan. Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Program-program yang tercantum dalam Rencana Strategis ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Kesamben

pada periode Tahun 2024-2026.

Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review Rencana Strategis menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.

Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Kesamben adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan:

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Subkegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan:

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan:

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Subkegiatan:

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya

Kegiatan:

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan:

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Subkegiatan:

1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan:

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan:

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan:

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Subkegiatan:

1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di

Wilayah Kecamatan

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan:

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Subkegiatan:

1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan:

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Subkegiatan:

1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan:

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Subkegiatan:

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan:

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Subkegiatan:

1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Indikator, sasaran dan rencana pencapaian program dan kegiatan tersaji dalam tabel-tabel berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Perangkat Daerah Kecamatan Kesamben Kab. Jombang Tahun 2024-2026

Renstra PD tahun 2024-2026 Sesuai Kepmendagri 050-5889																	Matriks Renstra Hasil Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur																		
Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikat or Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satua n	Data Capai an Awal	Target Renstra						Kondisi Kinerja Akhir Periode Tahun 2026		Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/S ubkegiatan	Indikator	Satua n	Data Capaian Awal	Target Renstra						Kondisi Kinerja Akhir Periode Tahun 2026		KETERANGAN	
									2024		2025		2026													2024		2025		2026					
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Meningkatkan Pelayanan Publik Kecamatan dalam rangka mewujudkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Kesamben	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	1. Nilai Evaluasi AKIP Kec. Kesamben	7.01.01	Penunjang Urusan Pemerintahan Kecamatan Kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	%	N/A	100	2.869.387.970	100	3.068.350.767	100	3.096.514.867	100	9.034.253.604	Meningkatkan Pelayanan Publik Kecamatan dalam rangka mewujudkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Kesamben	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	1. Nilai Evaluasi AKIP Kec. Kesamben	7.01.01	Penunjang Urusan Pemerintahan Kecamatan Kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	%	N/A	100	2.869.387.970	100	3.068.350.767	100	3.096.514.867	100	9.034.253.604		
				7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	%	N/A	100	2.940.000	100	3.260.000	100	3.600.000	100	9.800.000					7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	%	N/A	100	2.940.000	100	3.260.000	100	3.600.000	100	9.800.000		
				7.01.01.2.01.01	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	N/A	3	2.000.000	2	2.200.000	3	2.600.000	8	6.800.000					7.01.01.2.01.0001	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	N/A	3	2.000.000	2	2.200.000	3	2.600.000	8	6.800.000	Nomenklatur Sub Kegiatan Sama, hanya berbeda kode	
				7.01.01.2.01.06	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	N/A	5	940.000	5	1.060.000	5	1.000.000	15	3.000.000					7.01.01.2.01.0006	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	N/A	5	940.000	5	1.060.000	5	1.000.000	15	3.000.000	Nomenklatur Sub Kegiatan Sama, hanya berbeda kode	
				7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencairan gaji dan	%	N/A	100	2.273.785.270	100	2.501.163.797	100	2.501.163.797	100	7.276.012.864					7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencairan gaji dan	%	N/A	100	2.273.785.270	100	2.501.163.797	100	2.501.163.797	100	7.276.012.864		

						tunjangan ASN tepat waktu														tunjangan ASN tepat waktu													
						2. Persentas e laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	%	N/A	100		100		100		100					2. Persentas e laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	%	N/A	100		100		100		100				
				7.01.01. 2.02.01	1. Penyediaa n Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /Bula n	N/A	15	2.202.2 87.270	15	2.422.51 5.977	15	2.422.51 5.977	45	7.047.31 9.264			7.01.01.2 .02.0001	1. Penyediaa n Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /Bula n	N/A	15	2.202. 287.2 70	15	2.422.51 5.977	15	2.422.515.97 7	45	7.047.319.26 4	Nomenklatur Sub Kegiatan Sama, hanya berbeda kode	
				7.01.01. 2.02.03	2. Pelaksana an penatausa haan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausa haan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Doku men	N/A	12	70.398. 000	12	77.437.8 00	12	77.437.6 00	36	225.273. 600			7.01.01.2 .02.0003	2. Pelaksanaa n penatausa haan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausa haan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Doku men	N/A	12	70.39 8.000	12	77.437.8 00	12	77.437.600	36	225.273.600	Nomenklatur Sub Kegiatan Sama, hanya berbeda kode	
				7.01.01. 2.02.05	3. Koordinasi dan penyusun an laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lapor an	N/A	1	1.100.0 00	1	1.210.00 0	1	1.110.00 0	3	3.420.00 0			7.01.01.2 .02.0005	3. Koordinasi dan penyusuna n laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lapor an	N/A	1	1.100. 000	1	1.210.00 0	1	1.110.000	3	3.420.000	Nomenklatur Sub Kegiatan Sama, hanya berbeda kode	
				7.01.01. 2.05	Administrasi Kepegawa ian Perangkat Daerah	Persentas e pemenuha n administra si kepegawai an PD Kecamata n Kesamben	%	N/A	100	10.500. 000	100	10.500.0 00	100	10.500.0 00	100	31.500.0 00			7.01.01.2 .05	Administra si Kepegawai an Perangkat Daerah	Persentas e pemenuha n administra si kepegawai an PD Kecamata n Kesamben	%	N/A	100	10.50 0.000	100	10.500.0 00	100	10.500.000	100	31.500.000		
				7.01.01. 2.05.02	1. Pengadaa n pakaian dinas beserta atribut kelengkap annya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkap an	Paket	N/A	30	10.500. 000	30	10.500.0 00	30	10.500.0 00	90	31.500.0 00			7.01.01.2 .05.0002	1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkap annya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkap an	Paket	N/A	30	10.50 0.000	30	10.500.0 00	30	10.500.000	90	31.500.000	Nomenklatur Sub Kegiatan Sama, hanya berbeda kode	
				7.01.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentas e pemenuha n pelayanan administra si perkantoran	%	N/A	100	86.894. 700	100	92.596.9 70	100	99.756.2 70	100	279.247. 940			7.01.01.2 .06	Administra si Umum Perangkat Daerah	Persentas e pemenuha n pelayanan administra si perkantoran	%	N/A	100	86.89 4.700	100	92.596.9 70	100	99.756.270	100	279.247.940		
				7.01.01. 2.06.01	1. Penyediaan komponen instalasi listrik/pen erangan bangunan kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor yang Disediaka n	Paket	N/A	8	4.055.7 00	8	4.461.27 0	8	4.461.27 0	24	12.978.2 40			7.01.01.2 .06.0001	1. Penyediaan komponen instalasi listrik/pene rangan bangunan kantor. yang Disediaka n	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor yang Disediaka n	Paket	N/A	8	4.055. 700	8	4.461.27 0	8	4.461.270	24	12.978.240	Nomenklatur Sub Kegiatan Sama, hanya berbeda kode	

				7.01.01.2.06.02	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	N/A	24	17.500.000	24	19.250.000	24	19.250.000	72	56.000.000				7.01.01.2.06.0002	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	N/A	24	17.500.000	24	19.250.000	24	19.250.000	72	56.000.000	Nomenklatur Sub Kegiatan Sama, hanya berbeda kode
				7.01.01.2.06.04	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	N/A	1	44.000.000	1	45.600.000	1	48.400.000	3	138.000.000				7.01.01.2.06.0004	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	N/A	1	44.000.000	1	45.600.000	1	48.400.000	3	138.000.000	Nomenklatur Sub Kegiatan Sama, hanya berbeda kode
				7.01.01.2.06.05	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	N/A	2	5.600.000	2	6.160.000	2	9.645.000	6	21.405.000				7.01.01.2.06.0005	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	N/A	2	5.600.000	2	6.160.000	2	9.645.000	6	21.405.000	Nomenklatur Sub Kegiatan Sama, hanya berbeda kode
				7.01.01.2.06.06	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	N/A	1	2.352.000	1	2.400.000	1	2.400.000	3	7.152.000				7.01.01.2.06.0006	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	N/A	1	2.352.000	1	2.400.000	1	2.400.000	3	7.152.000	Nomenklatur Sub Kegiatan Sama, hanya berbeda kode
				7.01.01.2.06.09	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	N/A	6	13.387.000	7	14.725.700	8	15.600.000	21	43.712.700				7.01.01.2.06.0009	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	N/A	6	13.387.000	7	14.725.700	8	15.600.000	21	43.712.700	Nomenklatur Sub Kegiatan Sama, hanya berbeda kode
				7.01.01.2.07	Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	%	N/A	100	320.000.000	100	280.000.000	100	290.000.000	100	890.000.000				7.01.01.2.07	Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	%	N/A	100	320.000.000	100	280.000.000	100	290.000.000	100	890.000.000	
				7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3	600.000.000				7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3	600.000.000	Nomenklatur Sub Kegiatan Sama, hanya berbeda kode
				7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	9	120.000.000	8	80.000.000	5	90.000.000	22	290.000.000				7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	9	120.000.000	8	80.000.000	5	90.000.000	22	290.000.000	Nomenklatur Sub Kegiatan Sama, hanya berbeda kode

				7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	N/A	100	120.000.000	100	120.000.000	100	130.800.000	100	370.800.000					7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	N/A	100	120.000.000	100	120.000.000	100	130.800.000	100	370.800.000		
				7.01.01.2.08.02	1.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	N/A	24	40.800.000	12	40.800.000	12	40.800.000	36	122.400.000					7.01.01.2.08.0002	1.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	N/A	24	40.800.000	12	40.800.000	12	40.800.000	36	122.400.000	Nomenklatur Sub Kegiatan Sama, hanya berbeda kode	
				7.01.01.2.08.04	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	N/A	25	79.200.000	12	79.200.000	12	90.000.000	36	248.400.000					7.01.01.2.08.0004	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	N/A	25	79.200.000	12	79.200.000	12	90.000.000	36	248.400.000	Nomenklatur Sub Kegiatan Sama, hanya berbeda kode	
				7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	N/A	100	55.268.000	100	60.830.000	100	60.794.800	100	176.892.800					7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	N/A	100	55.268.000	100	60.830.000	100	60.794.800	100	176.892.800		
				7.01.01.2.09.02	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	N/A	10	33.200.000	9	36.520.000	9	36.520.000	27	106.240.000					7.01.01.2.09.0002	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	N/A	10	33.200.000	9	36.520.000	9	36.520.000	27	106.240.000	Nomenklatur Sub Kegiatan Sama, hanya berbeda kode	
				7.01.01.2.09.09	2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	N/A	2	10.100.000	2	11.110.000	2	11.110.000	6	32.320.000					7.01.01.2.09.0009	2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	N/A	2	10.100.000	2	11.110.000	2	11.110.000	6	32.320.000	Nomenklatur Sub Kegiatan Sama, hanya berbeda kode	
				7.01.01.2.09.10	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	N/A	16	11.968.000	16	13.200.000	16	13.164.800	48	38.332.800					7.01.01.2.09.0010	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	N/A	16	11.968.000	16	13.200.000	16	13.164.800	48	38.332.800	Nomenklatur Sub Kegiatan Sama, hanya berbeda kode	
	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Kesamben	2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	2. Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Kesamben	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	Nilai	N/A	78	8.600.000	79	9.460.000	80	9.460.000	80	27.520.000		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Kesamben	2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	2. Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Kesamben	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	Nilai	N/A	78	8.600.000	79	9.460.000	80	9.460.000	80	27.520.000		

				7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	%	N/A	100	8.600.000	100	9.460.000	100	9.460.000	100	27.520.000				7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	%	N/A	100	8.600.000	100	9.460.000	100	9.460.000	100	27.520.000	
				7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	N/A	12	8.600.000	12	9.460.000	12	9.460.000	36	27.520.000				7.01.02.2.02.003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	N/A	12	8.600.000	12	9.460.000	12	9.460.000	36	27.520.000	Nomenklatur Sub Kegiatan Sama, hanya berbeda kode
				7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan movev sosial budaya yang dilaksanakan	%	N/A	100	31.200.000	100	33.840.000	100	40.980.000	100	40.980.000				7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan movev sosial budaya yang dilaksanakan	%	N/A	100	31.200.000	100	33.840.000	100	40.980.000	100	40.980.000	
						Persentase rekomendasi Forkopimc am yang ditindaklanjuti	%	N/A	100		100		100		100							Persentase rekomendasi Forkopimc am yang ditindaklanjuti	%	N/A	100		100		100		100		
				7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan movev sosial budaya yang dilaksanakan	Laporan	N/A	5	31.200.000	5	33.840.000	5	40.980.000	15	106.020.000				7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan movev sosial budaya yang dilaksanakan	Laporan	N/A	5	31.200.000	5	33.840.000	5	40.980.000	15	106.020.000	
						Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimc am	Dokumen	N/A	4		4		4		12							Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimc am	Dokumen	N/A	4		4		4		12		
				7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Orang	N/A	100	23.400.000	100	25.740.000	100	32.480.000	100	81.620.000				7.01.05.2.01.003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Orang	N/A	100	23.400.000	100	25.740.000	100	32.480.000	100	81.620.000	Nomenklatur Sub Kegiatan Sama, hanya berbeda kode
				7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	N/A	4	7.800.000	4	8.100.000	4	8.500.000	12	24.400.000				7.01.05.2.01.008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	N/A	4	7.800.000	4	8.100.000	4	8.500.000	12	24.400.000	Nomenklatur Sub Kegiatan Sama, hanya berbeda kode
				7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti	%	N/A	100	8.900.000	100	10.230.000	100	9.800.000	100	28.000.000				7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti	%	N/A	100	8.900.000	100	10.230.000	100	9.800.000	100	28.000.000	

						instansi terkait														instansi terkait													
				7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikkoordinasikan dengan instansi terkait	%	N/A	100	8.900.000	100	10.230.000	100	9.800.000	100	28.000.000				7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikkoordinasikan dengan instansi terkait	%	N/A	100	8.900.000	100	10.230.000	100	9.800.000	100	28.000.000	
				7.01.04.2.02.01	Koordinasi /Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundangan-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundangan-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Laporan	N/A	12	8.900.000	12	9.300.000	12	9.800.000	36	28.000.000				7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundangan-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundangan-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Laporan	N/A	12	8.900.000	12	9.300.000	12	9.800.000	36	28.000.000	Nomenklatur Sub Kegiatan Sama, hanya berbeda kode
				7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	%	N/A	100	9.800.000	100	8.900.000	100	11.200.000	100	29.900.000				7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	%	N/A	100	9.800.000	100	8.900.000	100	11.200.000	100	29.900.000	
				7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDes dengan lengkap	Desa	N/A	14	9.800.000	14	8.900.000	14	11.200.000	14	29.900.000				7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDes dengan lengkap	Desa	N/A	14	9.800.000	14	8.900.000	14	11.200.000	14	29.900.000	
				7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	N/A	28	9.800.000	28	8.900.000	28	11.200.000	28	29.900.000				7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	N/A	28	9.800.000	28	8.900.000	28	11.200.000	28	29.900.000	Nomenklatur Sub Kegiatan Sama, hanya berbeda kode
				7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	%	N/A	100	44.100.000	100	48.510.000	100	48.510.000	100	141.120.000				7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	%	N/A	100	44.100.000	100	48.510.000	100	48.510.000	100	141.120.000	

						at yang aktif															at yang aktif														
				7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberda yaan Desa	Jumlah Lembaga/ Badan Usaha dan Pemberda yaan Masyarak at Desa yang dibina	Lemb aga	N/A	28	44.100.000	28	48.510.000	28	48.510.000	28	141.120.000					7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberday aan Desa	Jumlah Lembaga/ Badan Usaha dan Pemberda yaan Masyarak at Desa yang dibina	Lemb aga	N/A	28	44.100.000	28	48.510.000	28	48.510.000	28	141.120.000		
					Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	Desa	N/A	14	14	14	14							Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	Desa	N/A		14	14	14							14	14			
				7.01.03.2.01.01	Peningkat an Partisipasi Masyarak at dalam Forum Musyawar ah Perencana an Pembangu nan di Desa	Jumlah lembaga kemasyara katan yang berpartisipasi dalam forum musyawar ah perencanaan pembangu nan di Desa	Lemb aga Kema syakat an	N/A	78	15.000.000	84	16.500.000	84	16.500.000	84	48.000.000					7.01.03.2.01.0001	Peningkata n Partisipasi Masyaraka t dalam Forum Musyawara h Perencana an Pembangu nan di Desa	Jumlah lembaga kemasyara katan yang berpartisipasi dalam forum musyawar ah perencanaan pembangu nan di Desa	Lemb aga Kema syakat an	N/A	78	15.000.000	84	16.500.000	84	16.500.000	84	48.000.000	Nomenklatur Sub Kegiatan Sama, hanya berbeda kode	
				7.01.03.2.01.03	Peningkat an Efektifitas Kegiatan Pemberda yaan Masyarak at di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkat an Efektifitas Kegiatan Pemberda yaan Masyarak at di Wilayah Kecamatan	Lapor an	N/A	4	29.100.000	4	32.010.000	4	32.010.000	12	93.120.000					7.01.03.2.01.0003	Peningkata n Efektifitas Kegiatan Pemberday aan Masyaraka t di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkat an Efektifitas Kegiatan Pemberda yaan Masyarak at di Wilayah Kecamatan	Lapor an	N/A	4	29.100.000	4	32.010.000	4	32.010.000	12	93.120.000	Nomenklatur Sub Kegiatan Sama, hanya berbeda kode	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPD, maka Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang telah menetapkan indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, baik pencapaian terhadap indikator kinerja utama (IKU) maupun indikator hasil yang termuat dalam program-program yang akan dilaksanakan. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Kecamatan Kesamben dengan pemerintah, dan Kecamatan Kesamben akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKjIP tahunan.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Kesamben yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		2023	2024	2025	2026	
1.	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Kesamben	72	73	74	75	75
2.	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Kesamben	6,4	6,6	6,7	6,8	6,8
4.	Nilai Paten Kecamatan Kesamben	77,5	78	79	80	80
5.	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	N/A	100%	100%	100%	100%

6.	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	N/A	100%	100%	100%	100%

BAB VIII PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kesamben Tahun 2024 - 2026 merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemuthakiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Tahun 2022 tentang Penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir tahun 2023, diperlukan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026 yang disusun sebagai dokumen Pengganti RPJMD dan Renstra (2018-2023) yang telah berakhir sekaligus sebagai landasan pelaksanaan penyusunan RKPD dan Renja PD untuk tahun 2024-2026. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah harus memperhatikan sinkronisasi dan keselarasan Tujuan, Sasaran dan Program Perangkat Daerah, dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

Oleh karena itu, dengan tersusunnya dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang ini, diharapkan adanya keteraturan pelaksanaan program dan kegiatan serta dapat mewujudkan sinergitas kinerja Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang dengan pihak atau instansi terkait lainnya, baik di tingkat daerah maupun pusat.

Perubahan Renstra Kecamatan Kesamben akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kesamben yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tiga tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Kecamatan Kesamben wajib berpedoman pada dokumen Renstra.

Dan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Perubahan Renstra Kecamatan Kesamben, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

Kesamben, 27 Juni 2023
CAMAT KESAMBEN



EKA YULIANTO, S.STP

Pembina Tingkat I

NIP.19760713 199603 1 002